

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

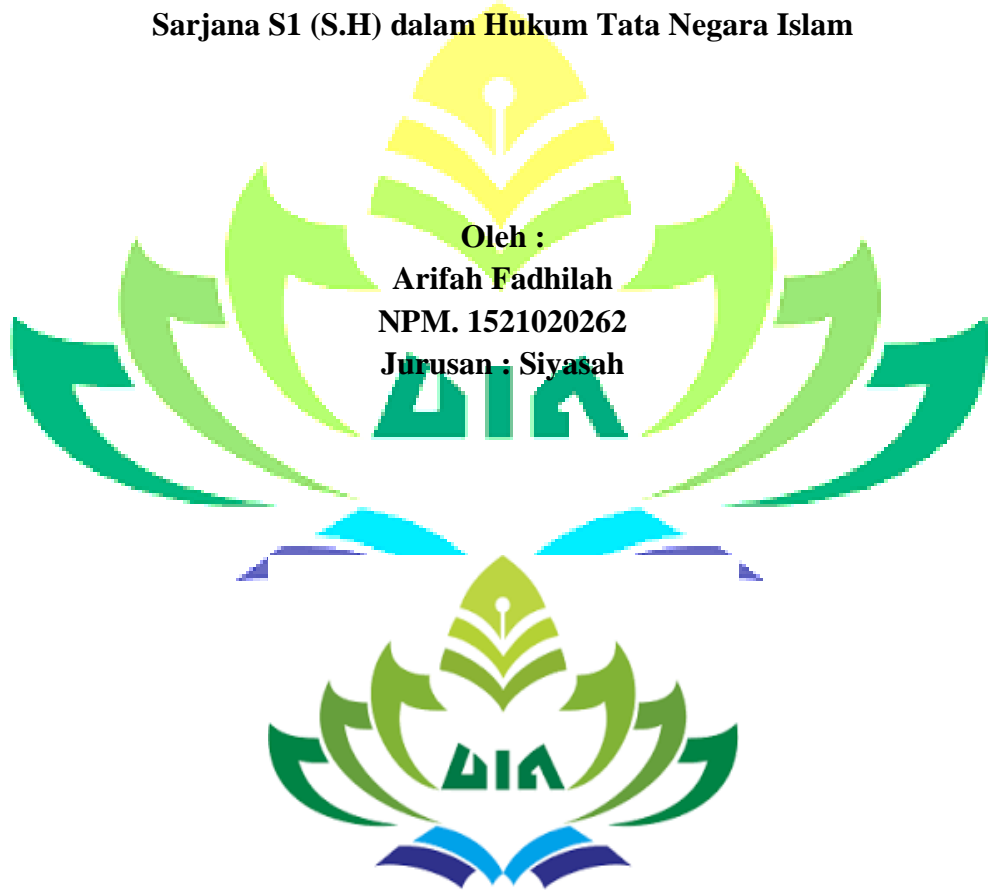
**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S1 (S.H) dalam Hukum Tata Negara Islam**

Oleh :

Arifah Fadhillah

NPM. 1521020262

Jurusan : Siyasa



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

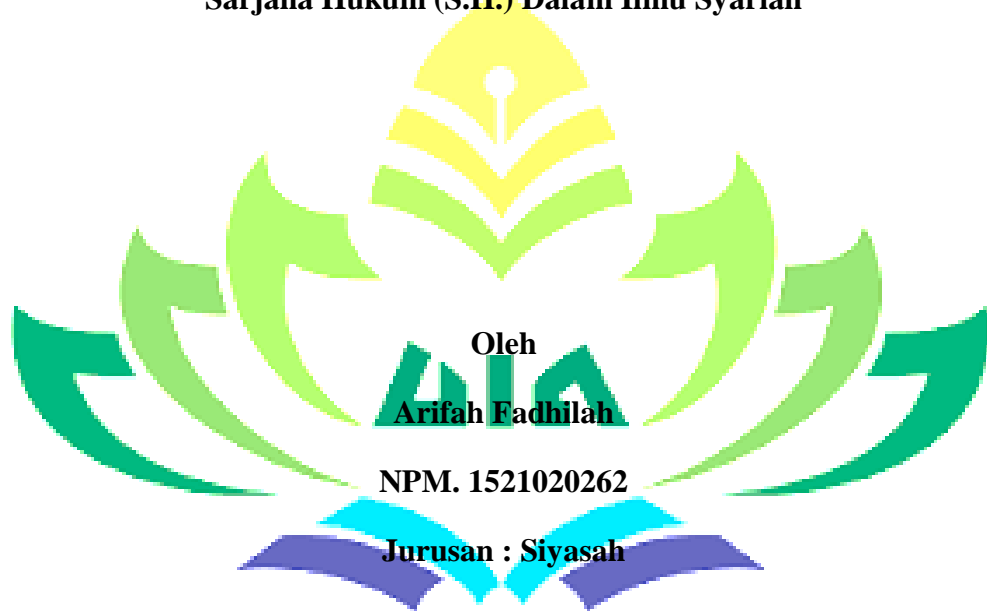
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I :Dra. Firdaweri, M.H.I.

Pembimbing II :Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Di kota Bandar Lampung dalam perencanaan suatu penataan ruang khususnya pada area trotoar telah terjadi beralih fungsinya trotoar yang digunakan sebagai tempat berjualan. Hal ini disebabkan karena tidak ada tempat mereka berjualan, dan tidak ada biaya untuk membayar sewa tempat. Dimana dalam teorinya penerapan dalam perencanaan trotoar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada pasal 59 ayat (2) huruf h. Hal ini mengakibatkan mengganggu aktifitas pejalan kaki di area fasilitas trotoar, karena fungsi trotoar diambil haknya oleh para pedagang kaki lima. Dalam ajaran Islam berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam dalam memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4):58. Oleh sebab itu permasalahannya dapat dirumuskan: 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mungkin mengenai peran pemerintah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan untuk mengetahui sejauh mungkin pandangan siyasah dusturiyah terhadap peraturan tersebut. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum tata Negara dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah *Field Research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data adalah editing dan sistematika data. Metode analisa data yang bersifat deskriptif analitis adalah kualitatif dan pendekatan yang bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah belum berjalan dengan optimal karena: dilokasi penelitian masih banyak para pedagang kaki lima berjualan diatas trotoar, hal ini disebabkan: a. Pemerintah Daerah tidak menyediakan lokasi khusus untuk para pedagang kaki lima, tetapi mereka membayar ke Pemerintah Daerah setiap harinya, b. Mereka tidak ada biaya sewa tahunan. Sehingga Kota Bandar Lampung masih belum terwujud menjadi kota yang indah, nyaman, dan aman. 2. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, agar pemerintah berbuat adil dalam memberikan hak masing-masing pemiliknya. Maka para pejalan kaki mempunyai hak untuk berjalan diatas trotoar. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa (4) ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan berbuat adil terhadap masyarakat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arifah Fadhilah
NPM	: 1521020262
Jurusan/Prodi	: Siyasa Syar'iyah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 September 2019

Penulis,




Arifah Fadhilah
1521020262



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyasaah Dusturiyah (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung).
Nama : Arifah Fadhilah
NPM : 1521020262
Jurusan : Siyasaah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Firdaweri, M.H.I
NIP. 195509191982032004

Yufi Wivos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasaah**

Dr. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung).” Disusun oleh, Arifah Fadhillah, NPM 1521020262, program studi siyasah, Telah diUjikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Erik R Gumiri, MH (.....)

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji I : Dra. Firdaweri, M.H.I (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

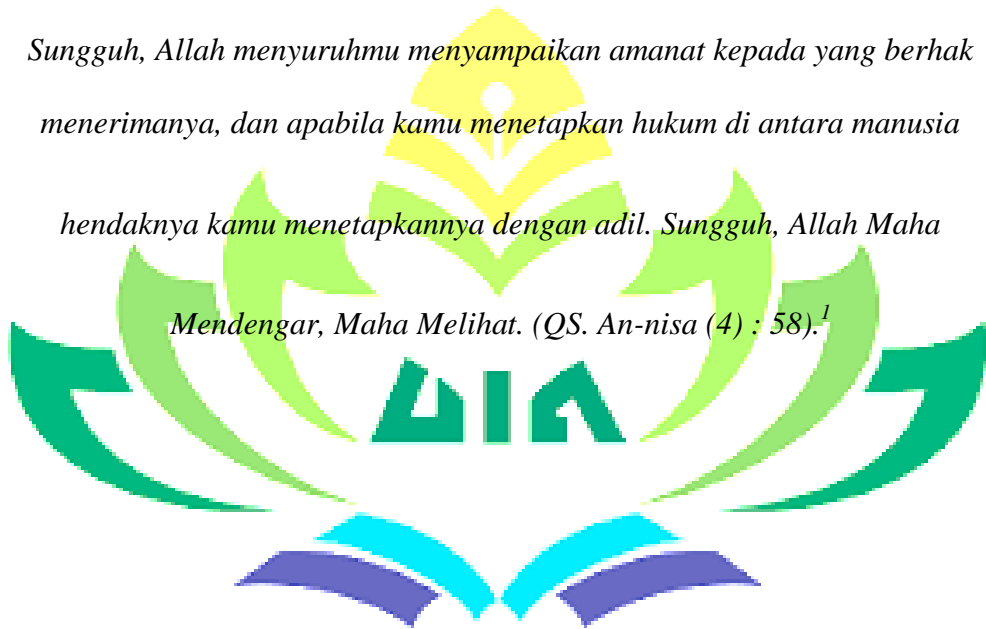
DEKAN

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerima, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-nisa (4) : 58).¹*



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 88.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Papa dan mamaku tersayang Awalludin Irsan dan Afrimawati, yang telah membesarkan, mendidik dan membimbingku sedari aku kecil hingga dewasa dan tidak henti-hentinya berdoa dan selalu mendukung untuk keberhasilan putrinya.
2. Kedua adikku tercinta, Ammar Daffathin, Aura Debytha Syahrani yang selalu menjadi penyemangat kakaknya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.

RIWAYAT HIDUP

ARIFAH FADHILAH, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 April 1997, anak pertama dari pasangan AWALLUDIN IRSAN dan AFRIMAWATI. Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2002 di Taman Kanak-kanan TK Trisulla 2 Bandar Lampung, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2Palapa Bandar Lampung pada tahun 2003. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 10 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur masuk PMA.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 September 2019

Yang Membuat,

Arifah Fadhilah

1521020262

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)**. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M. Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M,Ag. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dra. Firdaweri, M.H.I selaku Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga skripsi ini selesai..
5. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepala dan staf Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung terimakasih sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.
9. Terimakasih kepada sahabat yang sudah mau direpotkan dalam segala hal dalam penulisan skripsi ini Rahmatang, Gilang Ramadhan, Arief Fajar N.
10. Terimakasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi Karisma, Kimel, Inayah, Annisa, Mayang, Anggraini, Dini, Rahma, Ria, Yunnita, Desti, Ezza, Kak Krismanik, Rafi, Rahmat, Rio Fahni S.H, Fadel, Firdaus, Ahmad terimakasih atas bantuan dan arahnya selama ini.
11. Sahabat terbaikku Icul, Suisma, Vita, Revi, Deby, Puput, Dewi, Nindy, Qori, Oca, Ade, Andina, Titah, Ghina, Citra, Sheni, Atika, Devi, Nyala, Nia, Iril, Geo, Jannah terimakasih selalu ada hingga sekarang dan tiada henti-hentinya untuk menyemangatiku agar cepat selesai mengerjakan skripsi.
12. Rekan-rekan seperjuangan Siyash C terimakasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.

13. Saudara-saudaraku keluarga besar di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah

Syar'iyah Angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Fokus Penelitian	13
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian	13
G. Signifikasi Penelitian	14
H. Metode Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Rencana Tata Ruang Wilayah	21
1. Perencanaan	21
2. Penataan Ruang	27
3. Wilayah	33
B. Siyasah Dusturiyah	34
1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah	34
2. Ruang Lingkup Dusturiyah	37
3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah	40
C. Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif di Indonesia	46
D. Tinjauan Pustaka	47
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung	49
1. Sejarah	49
2. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung	50
3. Visi, Misi dan Sasaran	52
4. Struktur Organisasi	54
5. Tugas Pokok dan Fungsi	61
B. Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor	

	10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	62
BAB IV	ANALISIS PENELITIAN	
	A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	69
	B. Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Blangko Konsultasi
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung
6. Dokumen Pendukung (Foto)
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)”**, untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

a. Implementasi yaitu dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya.²

b. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

² Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), hal. 240.

Jadi yang dimaksud implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah proses pelaksanaan setelah adanya suatu perencanaan yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan didalam peraturan tersebut.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah

- a. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.³
- b. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.⁴
- c. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.⁵

Jadi yang dimaksud Rencana Tata Ruang Wilayah adalah suatu rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota Bandar Lampung yang dikembangkan untuk fungsi prasarana wilayah kota Bandar Lampung.

3. Perspektif Siyasah Dusturiyah

- a. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁶
- b. Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.⁷

³Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Pasal 1 ayat 5.

⁴Ibid, Pasal 1 ayat 6.

⁵Ibid, Pasal 1 ayat 7.

⁶Peter Salim, Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: PT. Modern English pers, Balai Pustaka, 1989), h. 1545.

⁷Prof. H.A. Djazuli, *FIQH SIYASAH: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: KENCANA 2003), h. 47.

Jadi yang dimaksud dalam perspektif siyasah dusturiyah adalah sudut pandang hubungan kerja sama antara pemimpin atau pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

4. Studi di Kota Bandar Lampung

- a. Studi adalah kajian, telaah, penelitian, dan penyelidikan ilmiah.⁸
- b. Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa.⁹

Jadi yang dimaksud dengan studi di Kota Bandar Lampung adalah suatu penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan di Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, dan Jalan Raden Intan, Provinsi Lampung.

Berdasarkan penjelasan istilah secara terminologis di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu upaya untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep siyasah dusturiyah dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung.

⁸Peter Salim, Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia.....,h. 861

⁹Pengertian Kota Bandar Lampung "(Online), tersedia di:https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung (8 mei 2018).

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Pentingnya perencanaan pengembangan wilayah merupakan salah satu cara yang tidak dapat diabaikan dalam hal pembangunan wilayah Kota Bandar Lampung. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung yang meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dalam pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota. Dalam pengembangannya juga wilayah Kota Bandar Lampung meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu.

Pejalan kaki memiliki hak untuk menggunakan fasilitas yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain. Namun, di Kota Bandar Lampung hak pejalan kaki sangat terabaikan. Trotoar yang seharusnya menjadi sarana untuk pejalan kaki dialih fungsikan untuk kepentingan lain, seperti lahan parkir kendaraan bermotor dan tempat berjualan pedagang kaki lima. Karena itu, salah satu upaya untuk melindungi seluruh masyarakat di Kota Bandar Lampung khususnya pejalan kaki adalah melalui penerapan perencanaan lokasi dan waktu berdagang, yaitu pemberian retribusi bagi pedagang kaki lima di lokasi tertentu dan pengaturan waktu berdagang dimana izin diprioritaskan untuk pedagang kaki lima yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dalam lokasi tersebut yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada pasal

59 ayat (2) huruf h. Penerapan pemanfaatan sarana pejalan kaki memungkinkan masyarakat untuk dapat menggunakan fasilitas trotoar.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang diambil erat pembahasannya dengan jurusan Hukum Tata Negara sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Berdasarkan data Fakultas, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Kota sebagai pusat kehidupan sebuah negara, maka harus disadari bahwa diperlukan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai demi menjangkau semua tempat yang dibutuhkan (pusat kegiatan) agar aktivitas masyarakat kota mampu berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Di kota Bandar Lampung, masih sangat tidak tertib dalam bertindak dan melakukan sesuatu untuk kepentingan personal. Seperti masih menjamurnya pedagang kaki lima yang melakukan jual beli di malam hari pada pelataran trotoar di Jalan Diponegoro.

Mengingat fungsi pejalan kaki untuk memberi kesempatan bagi lalu lintas orang, sehingga dapat berpapasan pada masing arah atau menyiap dengan rasa aman sebagaimana mestinya pejalan kaki harus merasa aman selama berjalan kaki, baik pada jalurnya sendiri maupun dalam hubungannya dengan suatu

sistem jaringan lalu lintas lainnya dan nyaman dengan permukaan fasilitas pejalan kaki yang telah ada.¹⁰

Pejalan kaki juga berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang di Jalan ditempat penyeberangan. Namun, hak pejalan kaki untuk berjalan di trotoar tepi jalan di Kota Bandar Lampung masih sangat terabaikan. Banyak trotoar atau pedestrian di Kota Tapis Berseri beralih fungsi dari semestinya. Antara lain mulai dari area parkir, pedagang kaki lima, hingga diambil oleh pemilik bangunan, dengan bertujuan untuk menjadikan tempat tersebut sebagai taman dan tiang reklame.

Dengan padatnya masyarakat sangatlah sulit untuk menemukan trotoar yang nyaman dan layak dipergunakan berjalan kaki, khususnya di jalan-jalan utama dan jalur padat di Jalan Kartini, Jalan Raden Intan dan banyak jalan lainnya yang trotoar telah berubah fungsi.¹¹ Sehingga pejalan kaki yang menggunakan fasilitas trotoar merasa terganggu yang sedang melintas disana. Oleh, karena itu hak-nya mereka sering terabaikan karena banyaknya pedagang kaki lima, atau menjadikannya sebagai lahan parkir ditrotoar tersebut. Sehingga pejalan kaki terkadang harus mengalah turun dari trotoar karena ada pedagang yang berjualan. Hal tersebut tentunya membahayakan karena bisa saja pejalan kaki celaka karena taserempet atau tertabrak kendaraan, bahkan tidak jarang para pengguna kendaraan roda dua naik ke trotoar dan sangat membahayakan pejalan-pejalan kaki yang sedang

¹⁰Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Perekayasaan Fasilitas Pejalan Kaki di Wilayah Kota.

¹¹Trotoar menjadi alih fungsi” (Online), tersedia di: <http://www.lampost.co/berita-banyak-trotoar-di-bandar-lampung-berubah-fungsi> (3 Januari 2019).

menggunakannya. Dampak negatif lainnya adalah pada kota, di mana kota akan terlihat kumuh dan berantakan karena trotoarnya beralih fungsi menjadi tempat parkir atau lapak pedagang.

Pada umumnya, pejalan kaki wajib menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang tepi dan wajib untuk menyeberang ditempat yang telah ditentukan.

Hukum, menurut Mohtar Kusumaatmadja, jika diartikan dalam arti yang luas, hukum tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan (Chidir Ali, 1991:1). Dengan demikian suatu unsur pokok dalam hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, dimana manusia hidup dalam suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat (Chidir Ali, 1991:1).¹²

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerbitkan peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mempunyai tujuan penataan ruang

¹²Zulfi Diane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM*, Vol. 6 No.2, Juli 2011, h.123.

adalah terwujudnya Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. sebagai pedoman dalam melakukan pergaulan hidup dimasyarakat adanya yang berisi tentang peraturan-peraturan. Undang-Undang tersebut seharusnya menjadi salah satu acuan untuk masyarakat berperilaku baik dan tertib.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pasal 59 ayat 2 huruf h yang berbunyi penerapan perencanaan lokasi dan waktu berdagang, yaitu pemberian retribusi bagi pedagang kaki lima di lokasi tertentu dan pengaturan waktu berdagang dimana izin diprioritaskan untuk pedagang kaki lima yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dalam lokasi tersebut.¹³

Bagaimanapun semestinya trotoar yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung itu digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan atau dihilangkan fungsinya. Apabila tidak dapat digunakan dengan ketentuan dan peraturan yang ada maka adanya suatu pelanggaran, karena telah merampas hak pejalan kaki yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 131 ayat (1) tentang hak pejalan kaki.

Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan

¹³Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*¹⁴, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

1. Siyasah Dusturiyah
2. Siyasah Maliyyah
3. Siyasah Qadla'iyyah
4. Siyasah Harbiyyah
5. Siyasah Idariyyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa *Persia*. Semula artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.¹⁵ Hal ini berarti *Siyasah Dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Oleh

¹⁴Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah*, (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan:2014), h. 9-10.

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:KENCANA 2014), h. 177-178.

sebab itu, keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya harus tetap terjaga.

Apabila kita lihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk permasalahan peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, permasalahan administratif dan kepegawaian.¹⁶

Pembahasan tentang siyasah dusturiyah juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk.

¹⁶H.A. Djazuli, *FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*, (Jakarta:KENCANA 2013), h. 48.

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangnya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.¹⁷

Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash Al-Qur'an maupun Hadist. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun diatas dasar keadilan, begitu pula setiap manusia diperintah untuk berlaku adil. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.¹⁸

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat.

Dalam al-qur'an dijelaskan secara jelas dalam Q.s An-Nisaa':58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi*....., h. 178-179.

¹⁸ Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁹

Dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Lebih tegas lagi keadilan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Itulah keadilan yang sebenarnya walaupun menurut manusia tampak tidak adil.

Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah Islam. Sebagai contoh para pejalan kaki mempunyai hak untuk berjalan di trotoar yang sudah disediakan dan yang sudah di atur dalam Peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah sebuah keadilan yang telah diatur oleh Allah dalam Syariah-Nya. Selain itu, keadilan dalam hak berarti keadilan yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan perlunya mengkaji Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah mengingat pentingnya Peraturan tersebut karena merupakan langkah awal untuk melindungi masyarakat yang tidak berkendara atau pejalan kaki dalam berlalu lintas mengingat ajaran islam sangat menganjurkan untuk setiap

¹⁹Arham bin Ahmad Yasin, Lc. MH. Al-Hafidz, *MUSHAF ASH-SHAHIB*, (Hilal Media:Depok 16963), h. 87.

umatnya agar selalu mensyukuri nikmat allah agar terciptanya aturan tentang pengembangan sarana maupun prasarana di Kota Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada upaya pemerintah dalam menerapkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ada di kota Bandar Lampung, dan melihat pandangan siyasah dusturiyah terhadap penerapan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pelaksanaannya.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

G. Signifikan Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar masyarakat kota Bandar Lampung khususnya pihak-pihak yang menggunakan fungsi trotoar yang sekarang tidak dipakai pada semestinya karena trotoar sekarang sudah di alih fungsikan sehingga pejalan kaki tidak dapat menggunakan fasilitas yang telah di sediakan salah satunya adalah trotoar dimana adanya suatu penataan kota yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung dan mampu memberikan analisis yang mendalam terhadap penerapan peraturan daerah tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penerapan dan penegakan hukum pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

H. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai penerapan fungsi trotoar terhadap hak pejalan kaki di Kota Bandar Lampung.²⁰ Dalam hal ini penulis akan terjun ke lapangan dimana penulis akan meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung).

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut sehingga dapat memperoleh kesimpulan.²¹ yang berkaitan

²⁰Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2015), h. 10.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyasaah Dusturiyah (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung).

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.²² Dalam hal ini data primer diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung baik dengan melakukan wawancara, observasi. Bahan-bahan primer meliputi al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.²³ Yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

²²Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta:GRAHA ILMU, 2010), h. 79.

²³*Ibid.*

Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi secara etimologi dapat diartikan penduduk atau orang banyak yang memiliki sifat universal. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa ruas-ruas jalan di Kota Bandar Lampung yang saya batasi di titik-titik rawan kemacetan di sepanjang Jalan Kartini, Jalan Diponegoro, dan Jalan Raden Intan Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena semua narasumber diambil sebagai sumber data pada penelitian, yaitu 3 orang pedagang kaki lima, 6 orang pejalan kaki, dan 1 orang pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁵ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* penentuan sampel dalam teknik ini dengan

²⁴Dr.Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta:GRAHA ILMU, 2011), h. 60.

²⁵ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, h. 81.

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²⁶ Purposive sampling adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kepala Seksi Penataan Ruang (1 orang) yang menyimpan data dan mengetahui perkembangan tentang penataan ruang di Kota Bandar Lampung, para pedagang kaki lima (3 orang) yang berjualan di pelataran trotoar kota Bandar Lampung, dan masyarakat (6 orang) yang masih menggunakan fasilitas trotoar tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi, yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa faset masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.²⁷ Dalam hal ini peneliti mengamati langsung di lapangan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 191), h. 102.

²⁷ Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h.82.

dan mencocokkan data yang di dapat dari hasil interview dengan data yang di amati sendiri di lapangan.

b. Metode Interview (wawancara)

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh para peneliti, sehingga metode ini sangat populer. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (interviewee).²⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan interview dengan karyawan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dan pedagang kaki lima di Jalan Diponegoro, Jalan Kartini dan Jalan Raden Intan dan pejalan kaki yang melintasi trotoar tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus, dalam pekerjaan

²⁸Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta:GRAHA ILMU, 2010), h. 80-81.

sosial dan dokumen lainnya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung).

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang di dapat sudah cukup dalam penelitian skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksa Data (Editing)

Editing yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²⁹

b. Koding

Koding yaitu mengklarifikasi jawaban-jawaban dari para responden ke dalam katagori-katagori. Biasanya klarifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda.³⁰

c. Penyusunan atau Sistematis Data (*constructing dan systematizing*)

Penyusunan atau Sistematis Data adalah pengkelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan di beri tanda menurut klarifikasi data dan urutan masalah.³¹

²⁹Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), h. 154.

³⁰*Ibid*, h.158.

³¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), Cet ke-1, h.9.

6. Analisis Data

Menurut Lexy J Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³²

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara *Deskriptif* yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dalam arti (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. Keduanya dalam laporan penelitian dapat digunakan agar saling melengkapi. Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks (lingkungan) tempat penelitian dilakukan dilaporkan dengan cara deskriptif sehingga pembaca memahami dengan baik laporan hasil penelitiannya.³³

Analisis kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, diredaksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti),

³² *Ibid*, h. 128.

³³ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial edisi kedua*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 129.

dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat).³⁴

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data yaitu kerangka berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.



³⁴ *Ibid*, h. 130.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Perencanaan

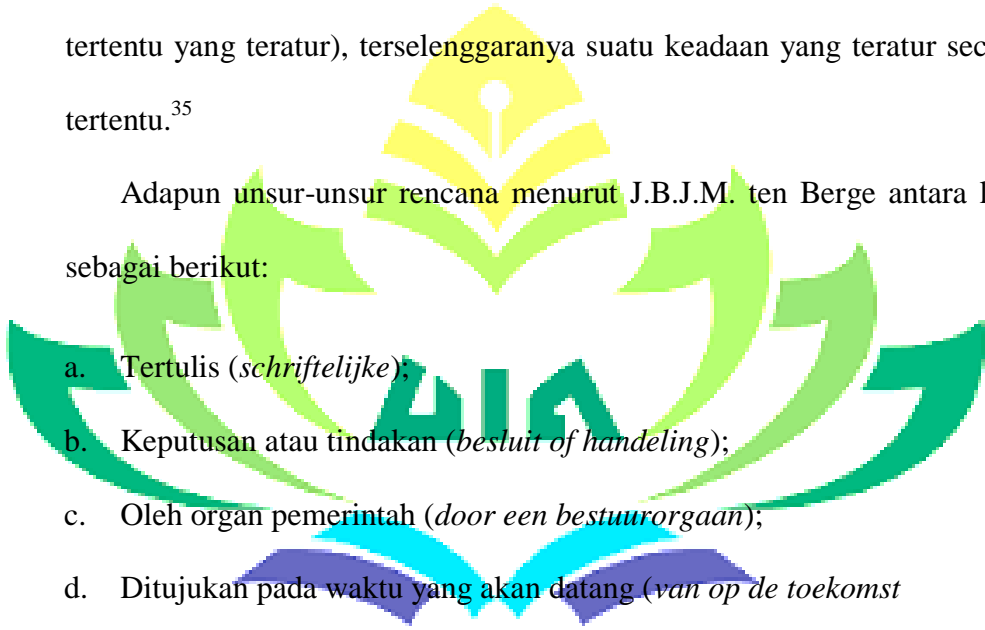
Setiap lembaga atau organisasi pemerintahan mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan baik dan sempurna dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, maka lembaga pemerintahan itu harus terlebih dahulu membuat suatu perencanaan dan strategis untuk mencapai suatu tujuan tersebut dengan baik. Dengan perencanaan yang baik maka kegiatan yang akan dilaksanakan akan tercapai dengan baik, dan dengan perencanaan yang baik maka akan mempermudah bagi lembaga tersebut melakukan evaluasi kegiatan itu dengan baik pula guna mengetahui sejauh mana keberhasilan dan pencapaian tujuan tersebut selama dalam kurung waktu yang telah ditentukan.

Bagi lembaga pemerintahan, pembuatan rencana kerja baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang adalah suatu keharusan sebelum melakukan suatu kegiatan, karena suatu kegiatan tanpa didahului oleh suatu perencanaan yang baik, maka kegiatan itu akan tidak terarah dan tidak bisa terukur keberhasilannya. Rencana dalam suatu lembaga pemerintahan merupakan suatu tindakan administrasi negara dalam rangka membuat suatu pedoman, instrumen, acuan, dalam melaksanakan suatu kegiatan. Rencana pada lembaga pemerintahan dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat eksekutif dan

legislatif untuk dijadikan pedoman atau acuan baik oleh aparat pemerintah maupun bagi masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan atau melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pengertian rencana menurut A.D. Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah adalah suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkutan paut yang mengusahakan dengan sepenuhnya terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur), terselenggaranya suatu keadaan yang teratur secara tertentu.³⁵

Adapun unsur-unsur rencana menurut J.B.J.M. ten Berge antara lain sebagai berikut:

- 
- a. Tertulis (*schriftelijke*);
 - b. Keputusan atau tindakan (*besluit of handeling*);
 - c. Oleh organ pemerintah (*door een bestuurorgaan*);
 - d. Ditujukan pada waktu yang akan datang (*van op de toekomst gerichte*);
 - e. Berbentuk tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan (*vaak te nemen besluiten op te verrichten handeling*);
 - f. Memiliki sifat yang tidak sejenis, beragam (*van een ongelijksoorting*);
 - g. Keterkaitan seringkali secara pragmatis (*in een orderlinge vaak programmatische samenhang*);
 - h. Untuk jangka waktu tertentu (*al dan niet voor een bepaalde duur*)”.

³⁵A.D Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 75.

P. de Haan, dkk. Yang dikutip Ridwan HR, mengatakan bahwa konsep perencanaan dalam arti luas adalah suatu persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.³⁶

Perencanaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu.³⁷

Pertama, perencanaan informatif (informative planning) yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif kebijakan tertentu. Rencana seperti ini tidak memiliki akibat hukum bagi warga negara.

Kedua, perencanaan indikatif (indicative planning), yaitu rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan.

Ketiga, perencanaan operasional atau normatif (operational normative planning) merupakan rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan ketetapan-ketetapan. Contoh perencanaan normatif adalah mencakup rencana tata ruang, rencana pengembangan perkotaan, rencana pembebasan tanah, rencana peruntukan,


³⁶Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 40.

³⁷Dr. Arba, *HUKUM TATA RUANG DAN TATA GUNA TANAH Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta:SINAR GRAFIKA 2017), h. 17-18.

rencana pemberian subsidi, dan lain-lain. Perencanaan seperti ini memiliki akibat hukum langsung baik bagi pemerintah maupun bagi warga negara.

Menurut Robinson Tarigan mengatakan bahwa masing-masing orang memberikan definisi yang berbeda tentang perencanaan sesuai dengan sudut pandang dan pekerjaan atau fokus perhatian, dan perbedaan luasnya atau sempitnya bidang tercakup dalam perencanaan mereka masing-masing.

Dengan demikian Robinson Tarigan mengemukakan definisi perencanaan sebagai berikut.³⁸

- 
- i. Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
 - ii. Perencanaan adalah menempatkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memerhatikan fakto-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut, memilih serta menempatkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menempatkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

³⁸Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 1-3.

Definisi perencanaan menurut Conyers dan Hills (1994) dalam Arsyad (1999:19) yang dikutip oleh Robinson Tarigan mengatakan, perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.³⁹

Sedangkan pengertian perencanaan menurut Key and Alder (1999), adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menempatkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.⁴⁰

Perencanaan adalah suatu pengambilan keputusan sebagai dasar hukum pemerintah dalam menentukan prioritas-prioritas, langkah-langkah, perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan hukum terhadap sesuatu. Pengambilan keputusan itu guna memilih tindakan untuk menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan yang sangat segera diselesaikan (saat ini) maupun permasalahan masa depan, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karenanya, maka setiap pengambilan keputusan harus melalui suatu proses yang rumit melalui pembahasan secara bersama oleh semua pihak sehingga diperoleh keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Demikian pula dalam penyusunan perencanaan memerlukan pembahasan bersama dari semua pihak, baik pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

³⁹*Ibid*, h. 4.

⁴⁰Ernan Rustiadi, *Rencana dan Pengembangan Wilayah*, (Jakarta: GRAHA ILMU 2009), h. 335.

Kelly and Becker (2000) mengatakan, secara umum proses perencanaan mencakup kegiatan-kegiatan:

- 1) pengumpulan data,
- 2) melakukan pendugaan kecenderungan-kecenderungan masa datang yang mungkin terjadi,
- 3) mempertimbangkan berbagai skenario alternatif,
- 4) analisis biaya manfaat dari kemungkinan-kemungkinan skenario yang ada,
- 5) memilih skenario terbaik/dikehendaki, dan
- 6) merencanakan pelaksanaan (plan of implementation).⁴¹

Sedangkan cara atau pendekatan di dalam melakukan perencanaan adalah: (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) menempatkan kebijakan (policy making), (4) implementasi, dan (5) monitoring.⁴²

Perencanaan dilakukan dalam rangka bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik dan terencana guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan juga merupakan upaya menyelesaikan suatu permasalahan, baik permasalahan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang harus melibatkan berbagai pihak yang

⁴¹*Ibid*, h. 350.

⁴²*Ibid*.

berkepentingan dan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Adapun lingkup perencanaan dari aspek wilayah meliputi perencanaan wilayah nasional, perencanaan wilayah provinsi, dan perencanaan wilayah kabupaten/kota, bahkan lebih spesifik lagi perencanaan kecamatan dan desa.

Di Indonesia juga dikenal jenis top-down and bottom-up planning, vertical and horizontal planning, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali.

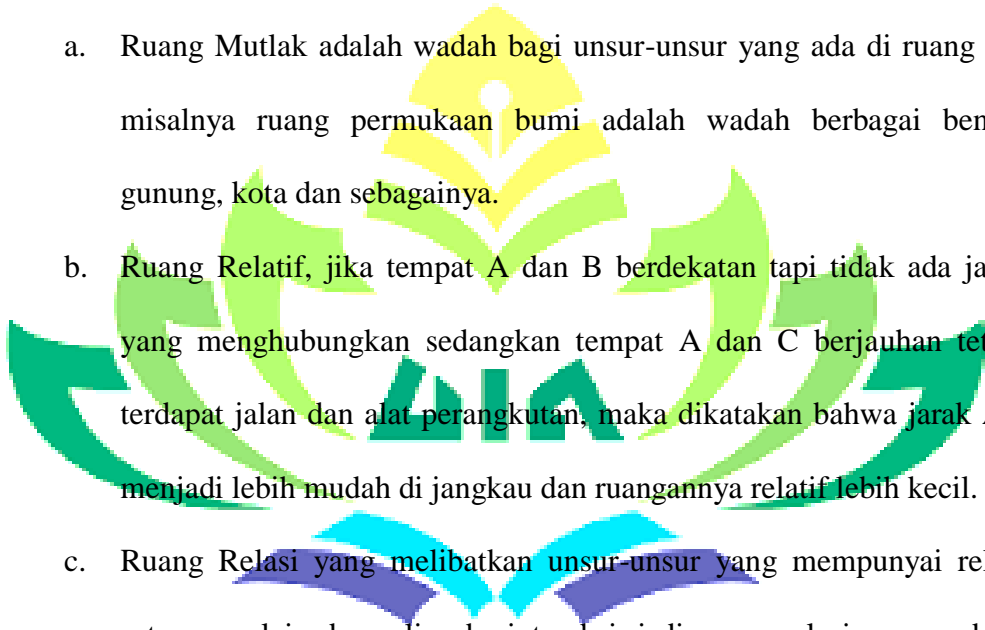
Penjelasan diatas menunjukkan bahwa semua jenis perencanaan dilakukan dalam rangka mengatur, menata dan menyelesaikan permasalahan penyediaan, peruntukan, dan penggunaan ruang dan sumber daya alam yang ada, baik laut, darat, dan udara dalam rangka pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

2. Penataan Ruang

Penataan ruang kota adalah satu upaya untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga

legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten.⁴³

Tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun. Sedangkan ruang merupakan wadah atau tempat atau lingkungan. Menurut Rahardjo Adisasmita bahwa ruang terbagi ke dalam 3 macam yaitu:⁴⁴

- 
- a. Ruang Mutlak adalah wadah bagi unsur-unsur yang ada di ruang itu, misalnya ruang permukaan bumi adalah wadah berbagai benua, gunung, kota dan sebagainya.
 - b. Ruang Relatif, jika tempat A dan B berdekatan tapi tidak ada jalan yang menghubungkan sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat perangkutan, maka dikatakan bahwa jarak AC menjadi lebih mudah dijangkau dan ruangnya relatif lebih kecil.
 - c. Ruang Relasi yang melibatkan unsur-unsur yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi, jadi ruang relasi mengandung unsur-unsur atau bagian-bagian yang berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur berubah sebagai akibat interaksi ruang dikatakan bahwa ruang itu berubah.

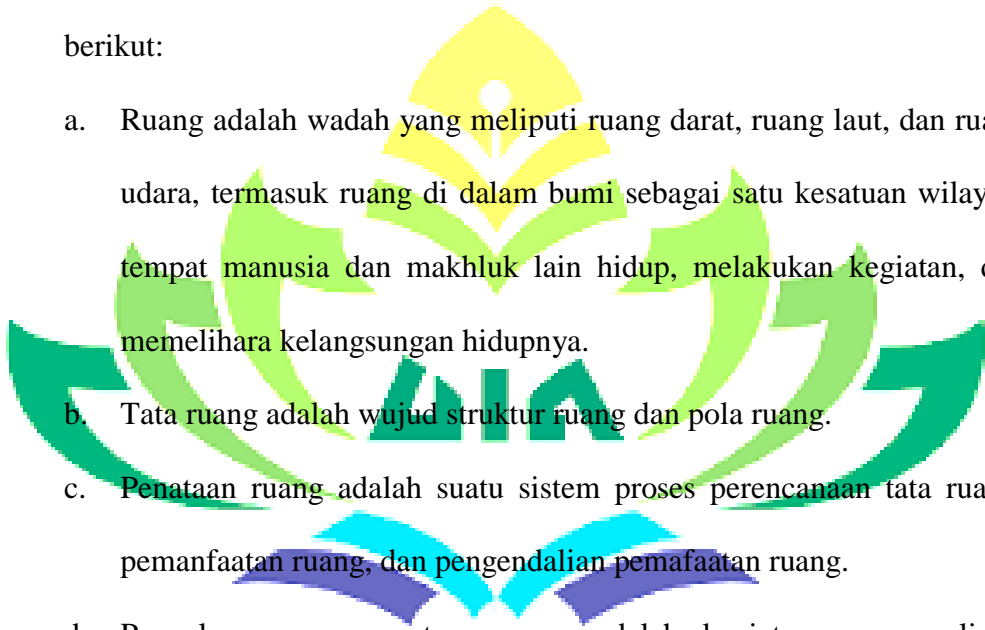
Immanuel Kant dan Plato memberi batasan tentang ruang secara filosofis yang mengartikan “Ruang bukanlah sesuatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia” sedangkan Plato mengemukakan

⁴³Budi Raharjo, *Kota Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pranada Media, 2004), h. 11.

⁴⁴Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 255.

bahwa “Ruang adalah suatu kerangka atau wadah di mana objek dan kejadian tertentu berbeda.”⁴⁵

Batasan dan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang diatur dalam Pasal 1. Di dalam Pasal 1 tersebut terdapat konsepsi-konsepsi hukum yang terpenting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, sebagai berikut:

- 
- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 - b. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 - c. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - d. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
 - e. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

⁴⁵*Ibid*, h. 253-254.

- f. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- g. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- i. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- j. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- k. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- l. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- m. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi

pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

- n. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- o. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
- p. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki fungsional dan membentuk suatu sistem.
- q. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- r. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

s. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

t. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁴⁶

Tata ruang (dengan arti pada tata) adalah pengaturan susunan ruang suatu wilayah dan daerah yang terwujudnya pemanfaatan bagi semi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang sangat menguntungkan bagi perkembangan di wilayah atau daerah tersebut.

Tata ruang (dengan arti pada ruang) adalah suatu wadah dalam tiga dimensi, yakni tinggi, lebar, dan kedalamannya yang menyangkut bumi, air, sungai, danau, lautan, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, udara, ruang, angkasa di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan dan penggunaannya serta pengelolaannya mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan dan kesejahteraan rakyat.⁴⁷

⁴⁶Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 1.

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

3. Wilayah

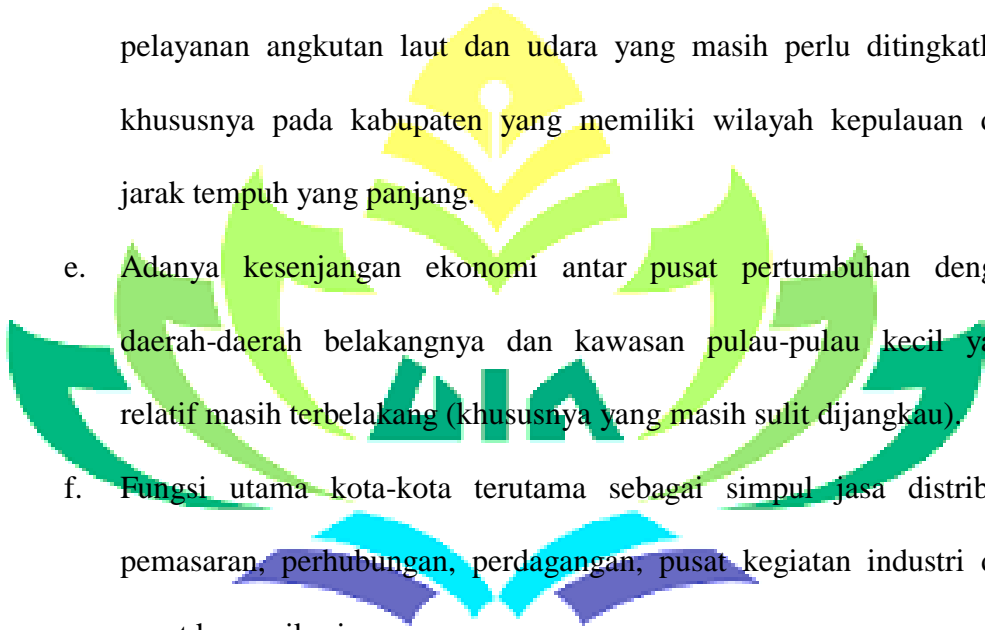
Perencanaan wilayah adalah perencanaan yang diterapkan pada suatu wilayah. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya adalah mengenai wilayah. Pengertian pertama yang harus ditanamkan dalam mengidentifikasi wilayah adalah: “wilayah adalah ruang” mengenai ruang ini ada dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pandangan subjektif dan objektif. Pandangan subjektif yang mengatakan bahwa penentuan wilayah sebagai cara membagi ruang untuk mencapai tujuan tertentu. Penentuan wilayah adalah suatu metode klasifikasi untuk menyusun pengelompokan ruang. Wilayah dipandang sebagai suatu alat untuk menerangkan ruang yang didefinisikan menurut kriteria tertentu. Dengan demikian apabila kriteria berubah, maka batas wilayahnya pun berubah. Definisi ini yang dikemukakan oleh Glasson pada tahun 1978.

Namun, Glasson mengungkapkan lagi bahwa pandangan objektif berpendapat sebaliknya. Jika menurut pandangan subjektif penentuan wilayah adalah cara untuk mencapai tujuan, maka menurut pandangan objektif penentuan wilayahnya itu sendiri.⁴⁸

Adapun yang dimaksud dengan konsep pembangunan wilayah Internasional, adalah:

- a. Potensi sumber daya dan laut yang berlimpah yang merupakan peluang bagi pembangunan wilayah.

⁴⁸Siti Sutriah Nurzaman, *Pengantar Pengembangan Wilayah*, (Bandung: Penerbit ITB 2012), h. 5-6.

- 
- b. Kondisi alam suatu provinsi yang merupakan wilayah daratan yang berdataran tinggi, memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
 - c. Adanya beberapa kawasan yang rawan bencana dapat menjadi kendala dalam pengembangan wilayah.
 - d. Akses antar kabupaten masih bertumpu pada angkutan darat, dan pelayanan angkutan laut dan udara yang masih perlu ditingkatkan khususnya pada kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan dan jarak tempuh yang panjang.
 - e. Adanya kesenjangan ekonomi antar pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya dan kawasan pulau-pulau kecil yang relatif masih terbelakang (khususnya yang masih sulit dijangkau).
 - f. Fungsi utama kota-kota terutama sebagai simpul jasa distribusi pemasaran, perhubungan, perdagangan, pusat kegiatan industri dan pusat komunikasi.

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga

dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁹

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan

⁴⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konatektualisasi Doktrin*, h. 2-4.

anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Secara istilah, diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-qur'an dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dalam kajian ini juga membahas suatu konsep negara hukum dalam siyasah dan

⁵⁰Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah*, (Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah 2014), h. 127.

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Fiqh *siyasah dusturiyah* adalah fiqh siyasah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

Jadi, dalam permasalahan fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah dibatasi dan hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵¹

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy* yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadis, *maqasid al-shari'ah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-

⁵¹*Ibid*, h. 177.

dalil *kulliy* tersebut menjadi suatu unsur dalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama yakni di sebut sebagai dengan fiqh.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah fiqh siyasah *dusturiyah*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundangan-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks ke Indonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵²

Abul A’la al-Maududi menafsirkan dustur dengan:

صك ينطوى على الاساسية التى يقوم عليها نظام دولة.

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”⁵³

⁵²Ruang lingkup fiqh siyasah” (Online), tersedia di: <http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html> (12 Juli 2019).

⁵³ H.A. Djazuli, *FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan*, h.52-53.

Abul A'la al-Maududi hanya mensyaratkan 4 syarat dalam memilih seorang pemimpin, yaitu: muslim, laki-laki, berakal dan dewasa, dan warga negeri Islam. Sangat jelas bahwa yang memberikan persyaratan yang banyak menginginkan seseorang al-imam al-adham (kepala negara) yang sangat ideal, sedangkan yang memberi persyaratan yang sedikit tampaknya lebih realistis.

Satu hal barangkali perlu diingat bahwa memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik adalah tidak terlalu sukar, akan tetapi yang sulit adalah memilih pemimpin yang baik diantara yang tidak baik. sebab bagaimanapun juga pemimpin itu harus ada di antara kelompok manusia.

Bahkan di dalam hadis dinyatakan:

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

(لرواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة)

“Apabila tiga orang bepergian, maka salah seorang daripadanya hendaklah menjadi pemimpinnya.”

Oleh karena itu, mendidik pribadi-pribadi untuk jadi pemimpin adalah penting, agar banyak terdapat calon-calon pemimpin yang memenuhi persyaratan yang paling banyak, sehingga mendekati kepada pemimpin yang ideal. Apabila yang ideal tidak ada, maka dipilih yang mendekati kepada ideal. Apabila itu pun tidak ada, maka dipilih yang paling maslahat di antara yang ada.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh *dusturiyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *Khulafa al-Rasyid* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Adapun sumber yang keempat, adalah hasil ijtihad para ulama', di dalam masalah fiqh *dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dan memahami semangat dan prinsip fiqh *dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan

konvensi. Ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah menjadi rujukan pada al-qur'an dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.⁵⁴

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Dalam konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, dan sumber perundangan maupun penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama.

⁵⁴Ibid, h.53-54.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukannya dalam sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi ini harus sejalan dengan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.⁵⁵

3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an di yakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.⁵⁶ Para tokoh muslim berpendapat bahwasanya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah, surat An-nisa ayat 59:

⁵⁵*Ibid.*, h.54.

⁵⁶Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan:Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), h. 274.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-nisa:59).⁵⁷

b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad saw. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*).

Menurut rumusan ulama ushul fiqh, As-Sunnah dalam pengertian istilah ialah *segala yang di pindahkan dari Nabi saw. Berupa perkataan, perbuatan ataupun taqrir yang mempunyai kaitan dengan hukum*.⁵⁸

Sunnah juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut.

1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:

- a) Fi'li, yaitu perbuatan Nabi
- b) Qauli, yaitu perkataan Nabi

⁵⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.87.

⁵⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 32.

- c) Taqriri, yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya/melarangnya.
- 2) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:
- a) Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
- b) Masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak tidak jalan indra.
- c) Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat masyhur dan mutawatir.⁵⁹

3) Ijma'

Ijma' menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijma' berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-qur'an atau Hadis.⁶⁰

Ijma' dibagi menjadi dua diantaranya :

- a) Ijma' *qat'i al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma' ini adalah *qat'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh *ijma'* itu. *Ijma'* yang

⁵⁹*Ibid.*, h. 33.

⁶⁰Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h. 14.

qat'i al-dalalah itu adalah *ijma'* sarih. *Ijma'* ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.

- b) *Ijma'* zanni al-dalalah terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah zanni (hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *ijma'* ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. *Ijma'* macam yang kedua ini adalah *ijma'* sukuti.⁶¹

4) Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Adapun qiyas terbagi dalam:

- a) *Qiyas Aqwa* adalah analogi yang '*illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada '*illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman

⁶¹*Ibid.*, h. 15-16

melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

- b) *Qiyas Mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas fi Ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-Qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Imam Syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum *al-asal*. Adanya kesamaan illat tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan dilalah nash tersebut dalam kategori *qiyas*. *Qiyas* kategori ini jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya, sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya dia setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mustashfa*. Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat, yakni lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi Ma'na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.

c) *Qiyas al-adhaf* adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-Risallah*, Imam Syafi'i telah membagi *qiyas* jenis kedua ini ke dalam dua bagian, yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang di dasarkan sebab hukum dan *qiyas al-syaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *Manaqib asy-syafi'i* ia menegaskan adanya *illat* pada hukum cabang lebih lemah daripada *illat* pada hukum *asal*.

C. Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif di Indonesia

Peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum positif di Indonesia adalah:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum positif di Indonesia.
2. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan secara wibawanya oleh masyarakat dan diberi status hukum positif.
3. Ada dalam hukum positif dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaringan bahan-bahan hukum positif di Indonesia.

4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Jelas bahwa hukum Islam ada dalam hukum positif di Indonesia sebagai pengaruh adanya teori *Receptie Exit*, teori *Receptie A Contrario*, dan pengaruh ajaran Islam itu sendiri, berkembanglah pernyataan bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam.⁶²

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penyusun melaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail mengenai penataan kota di Bandar Lampung. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

Rahmadani Efendi dalam skripsi yang berjudul “Jaminan Kenyamanan pejalan kaki dalam tata kelola transportasi (Transportation Governance) di Kota Yogyakarta”. Ia membahas tentang masalah jaminan yang belum berjalan dengan baik sehingga belum dapat menjamin kenyamanan pejalan kaki.

Andi Indriani Ratnasari dalam skripsi yang berjudul “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Pejalan Kaki oleh Pengendara Kendaraan di Jalan Raya Kota Makassar”. Ia membahas tentang dampak dari pelanggaran hak pejalan kaki yaitu yang pertama menjadi salah satu penyebab terjadi

⁶²Faisal, Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan, *Jurnal AL'ADALAH*, Vol.XI No.1, Juni 2013, h.8.

kecelakaan lalu lintas, kedua mendorong masyarakat kota Makassar untuk segera memiliki kendaraan pribadi, dan yang ketiga yaitu menciptakan keadaan kota yang tidak terkendali dan menyebabkan fasilitas-fasilitas pejalan kaki menjadi rusak karena tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ibrahim Mustafa dalam skripsi yang berjudul “Konsep Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Di Pantai Kering Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”. Ia membahas tentang kondisi keberadaan pedagang kaki lima di Pantai Kering yang saat ini menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di pusat kota memerlukan suatu konsep penataan yang lebih terarah, sehingga terhadap tata ruang kota dan pengembangannya di masa yang akan datang.

Fatwa Nurmala Sari dalam skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Kota Bandar Lampung”. Ia membahas tentang penataan PKL di PKOR sudah semakin baik, namun belum dapat dikatakan efektif dan efisien di mana Program Pemerintah dalam penataan PKL tidak konsisten dalam dilaksanakan.

Yulius Sitanggang dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Trotoar Pejalan Kaki Dalam Pemanfaatan Trotoar (Studi Kasus Jalan Jendral Urip Pontianak)”. Ia membahas tentang pengaruh pedagang kaki lima terhadap kenyamanan pejalan kaki dalam pemanfaatan trotoar di Jalan Jenderal Urip Pontianak.

Dari sekian penelitian di atas belum ditemukan adanya pembahasan yang fokus pada penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung).”



BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Dinas Tata Kota Bandar Lampung berdiri pada tahun 1993 yang kemudian bergabung antara Dinas Perkotaan dan Dinas Tata Bangunan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah, tentunya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang telah di atur terkait pembentukan Dinas, Badan dan Bagian. Dinas Tata Kota dalam hal ini tidak ada di dalam Peraturan Pemerintah yang disebutkan, karena adanya pelayanan dasar serta pelayanan lainnya yang telah diatur menurut Peraturan Pemerintah tersebut maka Dinas Tata Kota berubah menjadi Dinas Perumahan dan Permukiman⁶³. Dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung berdiri di tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

⁶³Dokumentasi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 2 Juni 2019.

2. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ lintang selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ bujur timur. Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah $197,22 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam lingkup wilayah Provinsi Lampung, luas wilayah yang dimiliki Kota Bandar Lampung hanya sekitar 0,55% dari total luas Provinsi Lampung. Meskipun demikian, kondisi fisik Kota Bandar Lampung terbilang cukup beragam. Topografi perbukitan, dataran dan pesisir dapat dijumpai di Kota Bandar Lampung, kawasan perbukitan dapat dijumpai di Kota Bandar Lampung, kawasan perbukitan dapat dijumpai di bagian Barat dan Timur seperti di Kecamatan Teluk Betung Timur dan Kecamatan Kemiling., sedangkan wilayah daratan terdapat di pusat kota seperti Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Enggal dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah pesisir terdapat di bagian Selatan seperti di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras.

Wilayah terluas di Kota Bandar Lampung adalah Kecamatan Kemiling dengan luas kurang lebih 24,24 Km² dan Kecamatan Sukabumi dengan luas kurang lebih 23,60 Km². Adapun wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Enggal.

Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20% dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0-40% wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0% diantaranya berada di wilayah Kecamatan

Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton.

Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40% diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur. Sedangkan, kawasan pesisir dapat dijumpai di Kecamatan Panjang, Kecamatan Bumi Waras, dan Kecamatan Teluk Betung Timur.⁶⁴

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman, Perencanaan Penataan Kota.

- a. Visi Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam Perencanaan Penataan Kota Bandar Lampung.

Terwujudnya bangunan dan lingkungan perkotaan yang berkualitas berbasis penataan ruang.

- b. Misi Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam Perencanaan Penataan Kota Bandar Lampung.⁶⁵

- 1) Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kualitas manajemen data dan sistem informasi yang transparan, akuntabel dan implementatif dalam mengembangkan

⁶⁴Dokumentasi Hasil Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2018, di catat pada tanggal 2 Juni 2019.

⁶⁵Dokumentasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, pada tanggal 3 Juni 2019

perumusan kebijakan teknis penataan ruang, bangunan dan lingkungan.

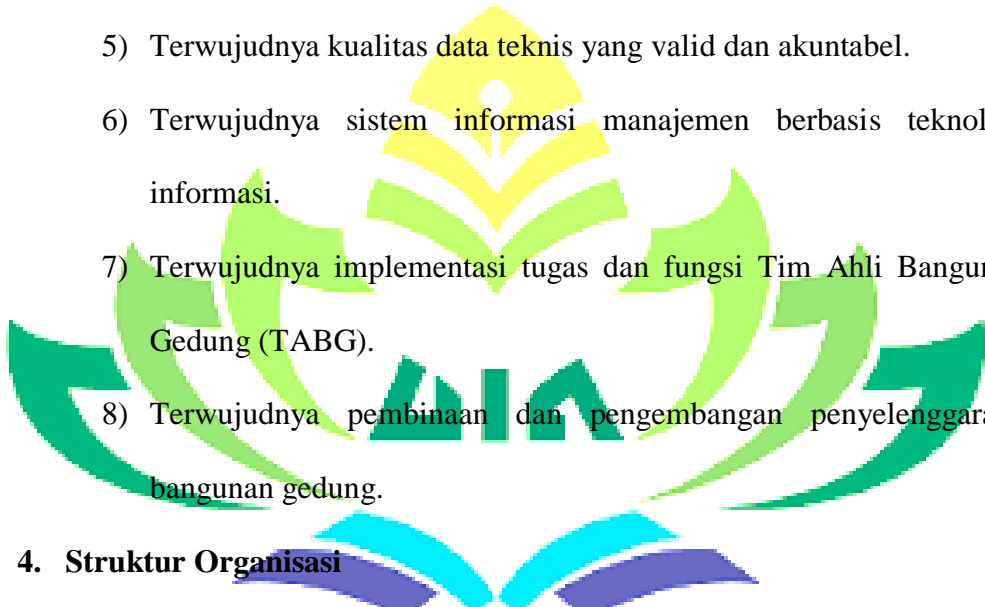
- 3) Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan pemukiman.
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta tata kerja aparatur.

c. Tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam Perencanaan Penataan Kota Bandar Lampung.

- 1) Terwujudnya pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan berbasis tata ruang wilayah, provinsi dan nasional.
- 2) Terwujudnya manajemen data.
- 3) Terwujudnya sistem informasi manajemen dalam mengembangkan kebijakan teknis penataan ruang, bangunan dan lingkungan.
- 4) Terwujudnya bangunan gedung yang laik fungsi.
- 5) Terwujudnya pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung.
- 6) Meningkatnya kinerja aparatur melalui penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi dengan dukungan sarana prasarana.

d. Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam Perencanaan Penataan Kota Bandar Lampung.

- 1) Dukungan dokumen perencanaan tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang yang mengacu pada perencanaan ruang provinsi dan nasional.

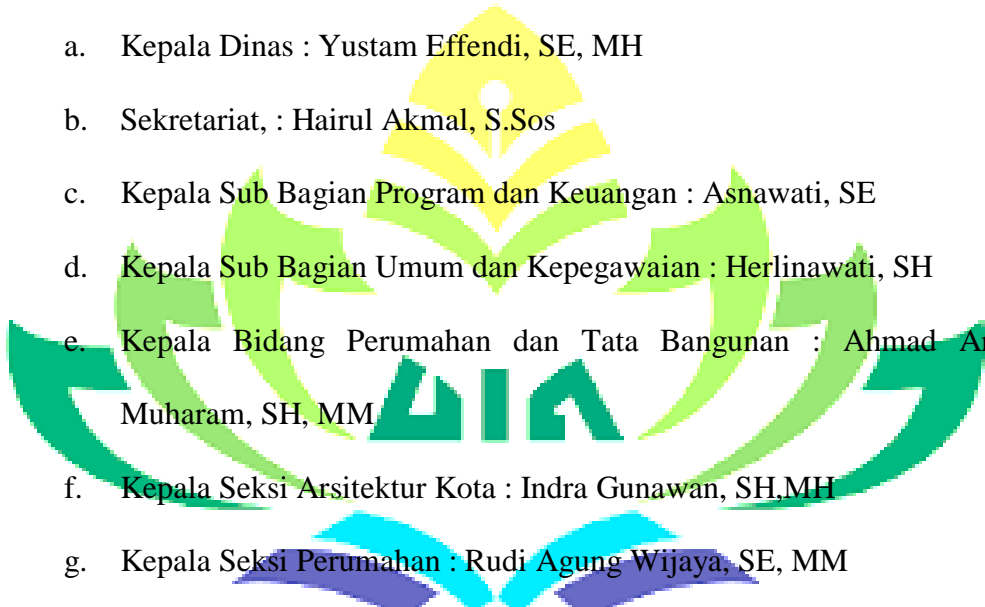
- 
- 2) Terwujudnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang secara berkesinambungan.
 - 3) Terwujudnya pengendalian kebijakan penataan ruang berdasarkan rencana tata ruang.
 - 4) Terwujudnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
 - 5) Terwujudnya kualitas data teknis yang valid dan akuntabel.
 - 6) Terwujudnya sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi.
 - 7) Terwujudnya implementasi tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
 - 8) Terwujudnya pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung.

4. Struktur Organisasi

Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja aturan dan gambar nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar kerja agar mereka melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan menanamkan sifat tanggung jawab sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi masalah di pekerjaan.

Tugas dan tanggung jawab seorang pekerja dapat dilihat dari struktur yang ada yang telah ditentukan oleh badan organisasi tersebut. Dinas Permukiman dan Perumahan Kota adalah organisasi di Provinsi Lampung yang bertujuan untuk penataan wilayah Kota Bandar Lampung.

Susunan struktur organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Bandar Lampung:⁶⁶

- 
- a. Kepala Dinas : Yustam Effendi, SE, MH
 - b. Sekretariat : Hairul Akmal, S.Sos
 - c. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan : Asnawati, SE
 - d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Herlinawati, SH
 - e. Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan : Ahmad Arief Muharam, SH, MM
 - f. Kepala Seksi Arsitektur Kota : Indra Gunawan, SH, MH
 - g. Kepala Seksi Perumahan : Rudi Agung Wijaya, SE, MM
 - h. Kepala Seksi Tata Bangunan : Diantina, S.sos, MM
 - i. Kepala Bidang Pengendalian dan Permukiman : Dekrison, SH, MH
 - j. Kepala Seksi Pengawasan : Nofy Nurmansyah, S.IP
 - k. Kepala Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum : Ari Budiman Gani, S.Sos, MM
 - l. Kepala Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pengaduan : Kamil, SH
 - m. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan : Erwansyah, ST., MM

⁶⁶Dokumentasi dari kepegawaian, tanggal 09 Juli 2019 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.

- n. Kepala Seksi Perencana Tata Ruang dan Pertanahan : Joko Sulistio, ST, MM
- o. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang : Ika Rawantika D, SP, MT
- p. Kepala Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang : Harry Gumanti. MM
- q. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- r. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut uraian-uraian Sub Bagian pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung:

1) Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang perumahan, permukiman, tata ruang dan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan meliputi penyusunan program, keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengadministrasian pengelolaan aset.

3) Sub Bagian Program Dan Keuangan

Sub bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;

- b) Menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi serta menyimpan data dan informasi program kegiatan dinas;
- c) Menghimpun dan menyusun pelaporan program dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- d) Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan perjalanan dinas;
- e) Menyusun dan melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta pengelolaan urusan aset;
- f) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program, informasi, keuangan dan aset.

4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a) Menyusun dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, urusan hukum, hubungan masyarakat dan menyiapkan rapat dinas;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

c) Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan umum dan kepegawaian.

5) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan

Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan.

6) Seksi Arsitektur Kota

Seksi Arsitektur Kota, mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam pemenuhan persyaratan tampak bangunan gedung (arsitektur), interior dan eksterior, keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang.

b) Menyiapkan bahan pertimbangan teknis keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa serta melestarikan bangunan-bangunan yang bernilai sejarah dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

c) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan operasional kebijakan arsitektur kota.

d) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan oprasional arsitektur kota.

e) Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan arsitektur kota.

7) Seksi Perumahan

Seksi perumahan mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan penilaian dan pemberian pertimbangan terhadap pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan fungsi bangunan yang meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya serta fungsi khusus.

8) Seksi Tata Bangunan

Seksi tata bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penetapan persyaratan teknis bangunan gedung ditunjang dari segi tata bangunan, lingkungan, keandalan bangunan gedung dan kelayakan fungsi.

9) Bidang Pengendalian Permukiman

Bidang Pengendalian Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum dan penyuluhan dan penanganan pengaduan.

10) Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian permukiman yang meliputi kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun.

11) Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum

Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman operasional pembinaan pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum dan melakukan pengumpulan dan

pengolahan data pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum terhadap kegiatan pembangunan dan tempat usaha.

12) Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pengaduan

Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan pedoman penyuluhan dan penanganan pengaduan di bidang pengendalian permukiman dan menyiapkan bahan pelaksanaan dalam rangka fasilitasi pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran dan pengendalian permukiman.

13) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang.

14) Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan

Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan program kerja lingkup tata ruang dan pertanahan dan menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pertanahan.

15) Seksi Pemanfaatan Ruang

Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang

termasuk pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan gedung dan non gedung.

16) Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan perencanaan dan program evaluasi pemanfaatan ruang yang meliputi penilaian dokumen rencana tata ruang dan implementasi pemanfaatan ruang.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam Perencanaan Penataan Kota Bandar Lampung.

a. Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam Perencanaan Penataan Kota Bandar Lampung.

Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam Perencanaan Penataan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Perumahan, Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota Bandar Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

b. Fungsi Pokok Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam Perencanaan Penataan Kota Bandar Lampung, antara lain:

Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- b. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;

⁶⁷Dokumentasi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, pada tanggal 10 Juni 2019

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung

Perencanaan Tata Ruang merupakan penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut berlandaskan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terpadunya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini penataan ruang dilakukan dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Menurut Bapak Harry Gumanti selaku Kepala Seksi Tata Ruang mengatakan bahwa dalam menerapkan sanksi-sanksi yang ada harus melibatkan atau terlibatnya dari Pemerintah kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang berlaku dengan tujuan untuk kenyamanan, keindahan.⁶⁸ Karena bagaimanapun

⁶⁸Harry Gumanti, Wawancara Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, pada tanggal 2 Juni 2019.

semestinya para pedagang kaki lima cukup mengganggu masyarakat dalam menggunakan fasilitas trotoar yang sedang melakukan aktivitasnya. Tujuan dari adanya sanksi dalam penerapan Peraturan yang sudah ada dan keikutsertaan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) untuk mengindahkan, menertibkan pedagang kaki lima yang berada di atas trotoar karena itu tidak mengindahkan bagi siapapun yang melihatnya. Menegaskan bahwa dari pihak pemerintah yaitu Walikota Bandar Lampung Bapak Herman HN sudah melakukan upaya dalam memberikan kenyamanan untuk masyarakat dalam menikmati jalan atau trotoar yang ada dengan cara mengindahkannya seperti pemasangan keramik yang terlihat unik warna-warni. Terkhusus dalam perihal ini termasuk dalam kawasan perdagangan dan jasa contohnya seperti Jalan Kartini. Kemudian Bapak Harry menegaskan tata ruang itu di ciptakan untuk pemenuhan hak masyarakat. Tata ruang itu salah satunya adalah adanya penghijauan di Kota Bandar Lampung agar ruas jalan terlihat indah untuk masyarakat merasakan kenyamanan dalam melintasi atau menggunakan trotoar yang dilakukannya itu adalah bukan tata ruang dalam hal penghijauan agar masyarakat dapat menghirup udara yang sejuk dan baik. Tata ruang yang baik seperti tata ruang yang dilakukan pemerintah atau diterapkan dalam Peraturan Daerah berupa tata ruang yang memberikan keamanan, kenyamanan, serta keindahan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Tetapi, pada kenyataan masih ada beberapa titik jalan yang masih perlu diperhatikan tata ruangnya. Titik jalan tersebut antara lain yaitu titik Jalan Kartini, Jalan Diponegoro, dan Jalan Raden Intan.

Jalan Kartini merupakan jalan pusat yang berada di Kota Bandar Lampung selain sebagai pusat jalan Kota Bandar Lampung jalan tersebut merupakan pusat perdagangan yang tak pernah sepi dari keramaian orang. Di jalan Kartini ini terdapat trotoar yang berada di kiri dari sisi jalan Kartini. Sebagaimana kita ketahui fungsi trotoar adalah untuk pejalan kaki tetapi berbanding berbeda karena trotoar ini digunakan oleh sebagian orang untuk berdagang dan parkir liar. Hal tersebut membuat beberapa sebagian orang mengeluh karena beralih fungsinya trotoar tersebut.

Menurut Bapak Kosim selaku pedagang kaki lima yang berjualan kaca di pelataran trotoar Jalan Kartini beliau sudah berdagang selama kurang lebih 2 tahun menurut beliau berjualan di tempat tersebut menguntungkan setidaknya dapat mengembalikan modal dalam berjualan.⁶⁹ Menurut beliau selama berjualan di tempat tersebut ada beberapa kali teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tetapi hal tersebut tidak membuat bapak Kosim jera untuk berjualan ditrotoar tersebut.

Jalan Diponegoro merupakan jalan yang menghubungkan untuk ke pusat Kota Bandar Lampung. Di jalan ini juga penggunaan trotoar beralih fungsi menjadi pusat perdagangan. Di jalan tersebut orang mulai berjualan saat pada pukul 17.30 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB. Di pelataran trotoar jalan Diponegoro trotoar yang sebagaimana fasilitas untuk para pejalan kaki setiap harinya di alih fungsikan sebagai tempat berjualan bahkan daerah pelataran

⁶⁹Kosim, Wawancara Pedagang Jalan Kartini Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, pada tanggal 19 Agustus 2019.

taman yang ada di jalan tersebut dijadikan tempat duduk untuk bersantai di malam hari.

Menurut bapak Andre salah satu penjual di trotoar pemerintah setempat sudah memberi izin kepada para pedagang kaki lima yang berada diatas trotoar pelataran Jalan Diponegoro bahkan mereka membayar uang kebersihan sebesar 2.000 setiap harinya dan beliau berkata bahwa pendapatan beliau dengan bekerja sebagai pedagang di trotoar tersebut lebih menguntungkan dibandingkan pekerjaan sebelumnya.⁷⁰

Menurut ibu Rahmawati sebagai pedagang kaki lima di Jalan Diponegoro beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui peraturan tersebut namun beliau beranggapan beliau hanya berdagang malam hari saja dan itupun beliau mengatakan bahwa jarang adanya pejalan kaki di malam hari.⁷¹

Dari beberapa Jalan di atas yang beralih fungsinya trotoar menjadi fungsi berjualan yang dilakukan oleh para pedagang, adapun wawancara dengan beberapa orang pejalan kaki yang mengeluhkan hal tersebut.

Desti mengeluhkan bahwa fungsi trotoar ini sangat mengganggu.⁷² Dia merupakan salah satu orang yang menggunakan trotoar tersebut. Menurutnya fungsi trotoar ini kurang maksimal dengan adanya para pedagang yang berjualan dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB sebagai seorang karyawan yang bekerja di Mall Kartini aktivitas pekerjaan tersebut sangat padat terlepas lagi pada saat jam istirahat dan waktu pulang sore. Karena

⁷⁰ Andre, Wawancara Pedagang di Jalan Diponegoro, pada tanggal 05 Agustus 2019.

⁷¹ Rahmawati, Wawancara Pedagang di Jalan Diponegoro TelukBetung Utara Kota Bandar Lampung, pada tanggal 05 Agustus 2019.

⁷² Desti Nur, Wawancara Pejalan Kaki Jalan Kartini Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, pada tanggal 23 Agustus 2019.

banyaknya orang pada saat jam istirahat untuk keluar makan siang, inilah yang membuat kepadatan dan kemacetan terjadi. Karena beralih fungsinya trotoar menjadi tempat berjualan.

Menurut ibu Yuli salah satu warga yang sering melintas di trotoar untuk berjalan kaki merasa sangat terganggu karena sangat tidak efektif dan mengganggu keindahan kota⁷³, sedangkan menurut Lifia salah satu warga Bandar Lampung yang setiap harinya berjalan kaki untuk menuju ke tempat ia bekerja sebagai pegawai cafe merasa sangat tidak nyaman, karena seringkali di tegur dengan orang yang tidak ia kenal yaitu para remaja yang nongkrong atau santai di tempat tersebut.⁷⁴

Menurut Rio Fahni yaitu seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung sekaligus aktivis kebijakan publik atau ketua umum himpunan mahasiswa hukum administrasi negara⁷⁵ mengatakan bahwa tata kelola kota tentang pekerja kaki lima atau pedagang kaki lima itu harus berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Bandar Lampung yang sudah dirancang sebelumnya dan harus ada ketegasan sanksi yang diberlakukan terhadap para pelanggar akan tetapi harus tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang kadang kala luput dari apa yang di lakukan satuan polisi Pamong Praja (SatPol PP) saat melakukan penertiban, selanjutnya saudara rio juga berkata pemerintah juga harus bisa memulai merancang

⁷³Yuli Permata Sari, Wawancara Pejalan Kaki Jalan Diponegoro TelukBetung Utara Kota Bandar Lampung, pada tanggal 23 Agustus 2019.

⁷⁴Lifia Lulu, Wawancara Pejalan Kaki Jalan Diponegoro TelukBetung Utara Kota Bandar Lampung, pada tanggal 23 Agustus 2019.

⁷⁵Rio Fahni, Wawancara Mahasiswa Universitas Lampung Jalan Raden Intan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, pada tanggal 25 Agustus 2019.

kembali RTRW kota Bandar Lampung yang menurutnya tidak baik. Salah satu contohnya fungsi zebra cross dan tangga penyebrangan orang yang terkadang tidak dipergunakan atau tidak berfungsi sama sekali.

Menurut Fadel Muhammad salah satu seorang karyawan disebuah bank swasta ia beranggapan bahwa penataan kota belum maksimal sebagaimana contoh pedagang kaki lima masih menggunakan lahan yang seharusnya steril dalam pedagang. Ia juga merasa sedikit terganggu dikarenakan para pedagang kaki lima yang ada di trotoar mengambil hak pejalan kaki yang mana tertuang dalam Undang-Undang untuk pengguna pejalan kaki.⁷⁶ Dan beliau juga berpendapat agar pemerintah menyediakan suatu tempat untuk para pedagang kaki lima agar tidak merugikan satu sama lain.

Menurut Septy Nadya seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui Undang-Undang tentang hak pejalan kaki dan menurutnya trotoar di Kota Bandar Lampung belum tersedia dengan baik sebagaimana salah satunya fasilitas trotoar dengan sarana dan prasarana untuk pejalan kaki khususnya kaum disabilitas. Dan beliau mengatakan agar pemerintah bersikap tegas dengan mengenakan sanksi agar para pedagang kaki lima nakal jera dan tidak berjualan di atas trotoar lagi.⁷⁷

⁷⁶Fadel Muhammad, Wawancara Pegawai Bank Swasta Kota Bandar Lampung, pada tanggal 25 Agustus 2019.

⁷⁷Septy Nadya, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, pada tanggal 26 Agustus 2019.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung

Dalam hal ini Pasal 59 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menyebutkan bahwa “perencanaan lokasi dan waktu berdagang, yaitu pemberian retribusi bagi pedagang kaki lima di lokasi tertentu dan pengaturan waktu berdagang di mana izin diprioritaskan untuk pedagang kaki lima yang memiliki kartu tanda penduduk dalam lokasi tersebut”. Pada pasal ini sudah sangat jelas digambarkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) wajib di tata lokasi, waktu untuk kenyamanan kota. Implementasi pasal tersebut sudah sebagian ada penerapannya, sebagian contoh tidak optimal pasal tersebut bisa kita lihat dengan masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan yang mengganggu ketertiban umum dan juga merusak pemandangan kota. Pada contohnya di Jalan Kartini, Jalan Diponegoro dan Jalan Raden Intan. Di jalan-jalan ini masih kita temui pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan tentu hal tersebut sangat mengganggu bagi pengguna jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Gumanti selaku kepala seksi tata ruang, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung untuk menertibkan para pedagang kaki lima guna menerapkan Peraturan Daerah tersebut. Namun pada kenyataannya masih juga terdapat pedagang kaki lima yang berjualan

pada area trotoar di jalan-jalan pusat tersebut. Menurut penulis, pengimplementasian peraturan daerah tersebut masih tidak optimal dikarenakan pihak dinas tata ruang kota yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) kota Bandar Lampung, hanya menertibkan dan tidak ada sanksi lain yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di area trotoar tersebut dan juga menurut penulis, para pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan kembali usai ditertibkan dikarenakan hal tersebut merupakan mata pencarian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja apabila usaha mereka ditertibkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal tersebut saya tinjau karena kurang implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung kurang maksimal.

Maka dari itu menurut penulis agar implementasi perda tersebut menjadi optimal, Pemerintah harus menyediakan lahan pengganti untuk para pedagang kaki lima agar mereka tetap dapat berjualan untuk terus bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, karena disini pemerintah dituntut untuk dapat bijaksana dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi bukan hanya menertibkan pedagang kaki lima saja tetapi pemerintah seharusnya dapat memberikan solusi kepada para pedagang kaki lima dengan memberikan tempat berdagang yang strategis sehingga tidak berdagang di area trotoar.

B. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hal yang baik, karena pembentukan peraturan tersebut merupakan realisasi dari konsep siyasah dusturiyah yang merupakan pembentukan Undang-Undang untuk kemaslahatan umat. Tetapi dalam penerapannya peraturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, dikarenakan masih dijumpai para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar jalan sehingga mengganggu para pejalan kaki untuk mendapatkan hak mereka dalam menggunakan fasilitas trotoar dan mengakibatkan merusak pemandangan kota Bandar Lampung. Namun di sisi lain harusnya pemerintah juga memberikan solusi untuk para pedagang kaki lima agar mereka tetap dapat berjualan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pemerintah dalam Islam dituntut untuk dapat memberikan solusi bagi rakyatnya agar dapat terwujud kemaslahatan umat.

Di dalam Islam juga menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat. Dalam al-qur'an dijelaskan secara jelas dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 58. Ayat tersebut Allah SWT memerintahkan seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Lebih tegas

lagi keadilan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Itulah keadilan yang sebenarnya walaupun menurut manusia tampak tidak adil.

Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah Islam. Sebagai contoh para pejalan kaki memiliki hak untuk berjalan ditrotoar yang sudah disediakan dan yang sudah di atur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana sebuah keadilan yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Syariah-Nya. Selain itu, keadilan dalam hak berarti keadilan yang telah ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih.

Berdasarkan uraian diatas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah akan terimplementasi secara baik jika adanya suatu kesadaran dari masyarakat untuk tidak berjalan di atas trotoar mengingat pentingnya peraturan tersebut karena merupakan langkah awal untuk menciptakan kota yang indah dan melindungi para pejalan kaki dalam berlalu lintas hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya agar selalu berbuat adil dalam segala hal agar terciptanya tata ruang kota yang indah, nyaman dan aman di Kota Bandar Lampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis teliti maka dapat di simpulkan bahwa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan fungsi rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, seperti masih banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, alih fungsinya trotoar yang dijadikan sebagai tempat berjualan dan lahan parkir, serta pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung belum memperhatikan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung. Faktor penghambat dalam merealisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penegakan hukum yaitu kurangnya ketegasan dari pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui adanya peraturan tentang penataan kota karena bagaimanapun sebuah kota khususnya Kota Bandar Lampung haruslah menjadi kota yang indah, nyaman, dan aman.
2. Dalam pandangan siyasah dusturiyah adanya suatu peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal iwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Pejalan kaki mempunyai hak

untuk berjalan di atas trotoar sebagaimana mestinya adanya peraturan tentang pedestrian di dalam peraturan daerah tersebut. Keadilan dalam hak juga berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah Islam. Sebuah keadilan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah dan Syariah-Nya, yaitu didalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 58.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan skripsi ini berikut penulis memberikan kepada pemerintah:

1. Kepada pemerintah perlu adanya kerjasama terpadu antar berbagai pihak masyarakat, instansi atau departemen dalam pemanfaatan fungsi tata ruang demi keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup dalam pemanfaatan fasilitas trotoar yang telah disediakan dan juga secara hukum pada umumnya serta dalam hukum Islam haruslah adil untuk mencapai kemaslahatan bersama.
2. Kepada masyarakat perlu adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan ruang khususnya pada area trotoar yang berada di kota Bandar Lampung demi keindahan kota Bandar Lampung yang sudah diatur oleh pemerintah sehingga para pendamping lebih mudah dalam mensosialisasikan fungsi trotoar di Kota Bandar Lampung.
3. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini dapat memberi informasi yang positif dan konstruktif dalam rangka lebih memahami hukum Islam.

